ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

FIRDA YANTI
NPM : 1602110061

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 September 2018

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FIRDA YANTI
NPM : 1602110061

Dengan judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi Akuntansi	Pembimbing I	Pembimbing II
ulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.	**Syamsidar, SE, M.Si, Ak.**	**Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.**
NIK. 19711019 200405 1 001	**NIK. 19730921 199901 2 001**	**NIK. 19700408 199401 1 001**

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 September 2018

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FIRDA YANTI
NPM : 1602110061

Dengan judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 September 2018

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE, M.Si, Ak.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIP. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 06 September 2018

Yang Menyatakan,

FIRDA YANTI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: **FIRDA YANTI**
NPM	: **1602110061**
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 September 2018

Yang Menyatakan,

FIRDA YANTI

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017".** Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan kasih sayang, tulus, ikhlas, dan sabar dalam mendidik, membesarkan, mendukung serta selalu memberikan semangat, dorongan, keyakinan, kecintaan, dan mendoakan saya dalam menjalani proses pembuatan tugas akhir ini sampai selesai.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis skripsi ini.

3. Bapak H. Zulkifli Umar SE, M.Si. Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Ekonomi Akuntansi Angkatan 2017 yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya disini, terima kasih atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi.

Semoga Skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca dan penulis, kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 6

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **7**
2.1 Kinerja Keuangan Daerah 7
2.1.1 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah. 8
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah 9
2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan 10
2.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 11
2.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 12
2.2.2 Rasio Keserasian 14
2.2.3 Rasio Pertumbuhan 15
2.3 Penelitian Sebelumnya 17
2.4 Kerangka Pemikiran 20

BAB III METODE PENELITIAN **22**
3.1 Desain Penelitian 22
3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 23
3.3 Teknik Analisis Data 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **28**
4.1 Gambaran Umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 28
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 28
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 34
4.1.3 Tugas Pokok Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 37
4.1.4 Visi dan Misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 39

4.2 Hasil Penelitian 40
4.2.1 Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan 40
4.2.2 Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 41
4.3 Analisis Kinerja Keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) 41
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 42
2. Rasio Keserasian 45
3. Rasio Pertumbuhan 47
4.4 Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53
5.1 Kesimpulan 53
5.2 Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Realisasi Pendapatan dan Belanja BAPEEDA Provinsi Aceh	3
Tabel	2.1	Pola Kemampuan Daerah Dalam Derajat Desentralisasi	14
Tabel	2.3	Penelitian Sebelumnya	19
Tabel	4.1	Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017	40
Tabel	4.2	Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017	41
Tabel	4.3	Pola Kemampuan Daerah Dalam Derajat Desentralisasi	42
Tabel	4.4	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2015-2017	43
Tabel	4.5	Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015-2017	45
Tabel	4.6	Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun Anggaran 2015-2017	46
Tabel	4.7	Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2015-2017	48
Tabel	4.8	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun Anggaran 2015-2017	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 57
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 58
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 59

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

FIRDA YANTI
1602110061

Pembimbing I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak.
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh tahun 2015-2017 dilihat dari: (1) Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Keserasian, dan (3) Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kinerja keuangan daerah pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 27,67% berada di kategori Cukup, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 100% berada di kategori Sangat Baik, pada Tahun Anggaran 100% berada di kategori Sangat Baik, (2) Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 94,19%, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 95,42%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 93,47%. Jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Modal pada Tahun Anggaran sebesar 5,81%, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 4,58%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 6,52%, dan (3) Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 0%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 105,7%. jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar -72,33%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 105,7%.

Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

FIRDA YANTI
1602110061

Pembimbing I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak.
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the regional financial performance at the Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) in Aceh Province in 2015-2017 seen from: (1) Fiscal Decentralization Ratio, (2) Harmony Ratio, and (3) Growth Ratio. This research used qualitative descriptive research method, that purpose to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field about the financial performance at Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh. Data collection is done by means of library research and field research on Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh. Based on the results of the study it can be seen that: (1) financial performance of the Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, when viewed from the Degree of Fiscal Decentralization in the 2015 Fiscal Year of 27.67% in the Fair category, in the 2016 Fiscal Year of 100% in the Very Good category, in the Budget Year 100% was in the Very Good category, (2) Financial performance of the Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, when viewed from the Operating Expenditure Ratios Ratio in the 2015 Fiscal Year of 94.19%, in the 2016 Fiscal Year of 95.42%, in 2017 Fiscal Year was 93.47%. When viewed from the Harmony Ratio of Capital Expenditures in the Fiscal Year of 5.81%, in the 2016 Fiscal Year of 4.58%, in 2017 Fiscal Year amounted to 6.52%, and (3) Financial Performance of the Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, when viewed from the PAD Growth Ratio in the 2016 Fiscal Year of 0%, in 2017 FY of 105.7%. when viewed from the Revenue Growth Ratio in 2016 Fiscal Year of -72.33%, in 2017 FY of 105.7%.

Key Words : financial performance, fiscal decentralization ratio, harmony ratio, and growth ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap

negara, termasuk setiap Pemdanya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39)

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Penyerapan Daerah semua hal yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tersebut. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan dan Penyerapan Daerah yang tersaji dalam APBA suatu pemerintah daerah menunjukkan kinerja kuangan daerah dalam satu anggaran, salah satu contohnya yaitu pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Realisasi Pendapatan dan Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Realisasi Pendapatan	Jumlah RealisasiI Belanja	Defisit	Persentase(%) Penyerapan Defisit
1	2015	18.072.158,00	59.471.691.713,00	(59.453.619.555,00)	(329%)
2	2016	5.000.000,00	50.330.501.648,00	(50.325.501.468,00)	(1.006.610%)
3	2017	10.284.932,00	71.056.612.288,00	(59.562.851.155,00)	(690.880%)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran data diolah, (2018)

Tabel diatas menunjukkan pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp 18.072.158,00, tahun 2016 sebesar Rp 5.000.000,00, dan pada tahun 2017 Rp 10.284.932,00. Jika ditinjau dari Penjualan yang sangat tinggi pada tahun 2015 sebesar Rp 59.471.691.713,00, tahun 2016 sebesar Rp 50.330.501.648,00, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 71.056.612.288,00 maka pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh tahun 2015-2017 akan mengalami defisit jika di tinjau dari aspek Penyerapan cenderung tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari indikator penilaian pendapatan sangat rendah dibandingkan dengan indicator penilaian Belanja yang sangat tinggi, sehingga terkesan kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor BAPPEDA Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 dalam mengelola keuangannya masih lemah dan fenomena yang seperti ini sangat mempengaruhi tingkat pembangunan di Kantor BAPPEDA Provinsi Aceh.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBA yang telah dilaksanakan. Menurut Pramita (2015), hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otoda.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBA dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBA harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan . Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan, analisis rasio terhadap realisasi APBA juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otoda sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otoda

yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Menyangkut dengan hal ini, Penulis memilih BAPPEDA Provinsi Aceh sebagai objek Penelitan dengan mengangkat judul, **"Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017".**

1.2 Rumusan MasalahPenelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh 2015-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Instansi pemerintahan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan

dalam rangka upaya peningkatan kinerja keuangan daerah pada BAPPEDA Provinsi Aceh.

2. Ilmu pengetahuan

   Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan yang lebih baik lagi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penulisan skripsi sesuai dengan topik yang akan dibahas, maka peneliti mencoba untuk memberi ruang lingkup penelitian ini dengan hanya meneliti tentang kinerja keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 yang dilihat dari aspek anggarannya dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2012:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan keuangan daerah, menurut Adisasmita (2014:29) merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah sehubungan dengan penggunaaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pencapaian kinerja. Maka untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan tujuan yang jelas. Bila dilakukan secara berkesinambungan, pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus akan mencapai keberhasilan yang diinginkan untuk kedepannya. Menurut Ulum (2012:21), tujuan pengukuran kinerja sector public adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi yang lebih baik *(top down and bottom up).*
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi dan untuk mencapai *goal congruence*, dan
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka pemerintahan akan mendapat manfaat langsung, diantaranya yaitu (Ulum, 2012:21):

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen .
2. Memberikan arah untuk mencapai tingkat kinerja yang ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman *(reward and punishment)* secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang optimal, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Adisasmita (2014:36), banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu oragnisasi, antara lain yaitu:

1. Sumber daya manusia, merupakan faktor terpenting, dikarenakan manusia adalah yang melaksanakan pekerjaan dan yang menentukan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
2. Sumber dana dan pembiayaan (anggaran), karena kegiatan apapun baik operasional maupun non opersional tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak tersedia biaya ataupun anggaran yang cukup memadai. Faktor anggaran juga merupakan *input* yang menentukan bagi terwujudnya kegiatan-kegiatan untuk mencapai *output* atau hasil yang konkrit.
3. Sarana dan prasarana, karena digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktifitas pemerintahan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jika manusia sebagai pengendali, anggaran sebagai penggerak, maka sarana dan prasarana adalah sebagai kendaraannya atau alat yang digunakan agar sampai ke tujuan dengan mudah dan efisien.
4. Waktu yang digunakan, yaitu ketepatan dan kecukupan waktu yang disediakan di dalam melaksanakan tugas. Ketepatan waktu yang dimaksudkan adalah baik saat pelaksanaan maupun saat pelaporan, sedangkan kecukupan waktu yang dimaksudkan adalah ketersediaan waktu dalam persiapan ataupun pelaksanaan.

2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Mahsun (2012:147), menyatakan pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

Menurut Ahmad (2013:84), pengukuran kinerja keuangan sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dpat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif.Berbeda dengan sektor swasta,karena sifat *output* yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran *finansial* saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja *nonfinasial*¸ dan
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

Menurut Adisasmita (2014:110), pengukuran kinerja keuangan pemerintahan merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan *(inputs)*, keluaran *(outputs)*, hasil *(outcomes)*, manfaat *(benefits)*, dan dampak *(impacts)*, yaitu :

1. Indikator masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.
2. Indikator keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik ataupun non fisik.
3. Indikator hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)
4. Indikator manfaat *(benefits)* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
5. Indikator dampak *(impacts)* adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:167), analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan, yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi yang daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadappemerintah daerah lainnya.

Menurut Ulum (2012:30), penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel,analisis rasio keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Lebih lanjut Ulum (2012:30), menyatakan analisis rasio keuangan daerah merupakan usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Terdapat beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

2.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Sistiana dkk (2014), desentralisasi fiscal didefinisikan sebagai penyerahan tanggungjawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan yang ada dibawahnya, dengan tujuan yaitu:

1. *Fiscal sustainability,* yaitu menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiscal dalam konteks makro ekonomi.
2. Koreksi atas *vertical inbalance,* yaitu memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui strategi *taxing power.*
3. Koreksi atas *horizontal inbalance,* yaitu memperkecil kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah karena adanya variasi kemampuan keuangan antar pemerintah daerah.
4. Meningkatkan akuntanbilitas, efektifitas, dan efisiensi anggaran yang berkorelasi positif dengan kualitas kinerja pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan public
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Lebih lanjut Sistiana dkk (2014), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak *(taxing power)*, karena secara teori dengan adanya keuntungan pajak maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik. Oleh karena itu, rasio desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, dan sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Menurut Adhiantoko (2013), secara skematis rasio ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, begitu juga sebaliknya. Sebagai pedoman untuk melihat kemampuan daerah dalam desentralisasi fiskal, makadapat dijelaskan pada table berikut ini:

Tabel 2.1

Pola Kemampuan Daerah Dalam Derajat Desentralisasi

No	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
1	00,00 - 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 - 20,00	Kurang
3	20,01 - 30,00	Cukup
4	30,01 - 40,00	Sedang
5	40,01 - 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber: Adhiantoko (2013)

2.2.2 Rasio Keserasian

Secara bahasa, keserasian diartikan sebagai cocok, sesuai, selaras, dan sepadan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Dengan demikian, rasio keserasian merupakan rasio untuk mengukur kesesuaian kinerja keuangan daerah. Rasio ini timbul dikarenakan dalam pengelolaan belanja daerah, terdapat dua kelompok belanja, yaitu belanja operasional atau belanja rutin dengan belanja modal atau belanja pembangunan. Oleh karena itu, keserasian yang dimaksudkan adalah keseimbangan antara kedua kelompok belanja tersebut

Menurut Halim (2012:236) terdapat dua (2) perhitungan dalam rasio keserasian, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka

pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Secara skematis, rasio keserasian untuk belanja operasi dapat ditulis sebagai berikut (Mahmudi, 2013:164):

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya rasio keserasian untuk belanja modal, yang merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, maka dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Secara skematis, rasio keserasian untuk belanja modal dapat ditulis sebagai berikut (Mahmudi, 2013:164):

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Kedua rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

2.2.3 Rasio Pertumbuhan

Secara bahasa, pertumbuhan diartikan sebagai hal atau keadaan yang tumbuh, berkembang, atau maju (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Dengan demikian,

rasio pertumbuhan keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan pertumbahan keuangan daerah setiap tahunnya. Menurut Mahmudi (2013:138), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau nilai belanja secara positif atau negatif.

Menurut Ulum (2012:33), rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Terdapat dua (2) jenis pertumbuhan keuangan daerah, yaitu pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100$$

Dengan Keterangannya:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Semakin tinggi nilai kedua rasio ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan keuangan daerah baik pendapatan PAD ataupun pendapatan secara keseluruhannya semakin baik, begitu juga sebaliknya. Pendapatan secara

keseluruhan yang dimaksud adalah seluruh pendapatan daerah yang menjadi bagian dari APBA suatu Pemerintah daerah.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Karlina (2017) yang disusun dalam sebuah skripsi "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015". Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012-2015 yang didapatkan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Wahidah Niken Kusumadewi (2016) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014". Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa utara dalam Pengelolaan APBD tahun Anggaran 2012-2014. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil LRA APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam Pengelolaan APBD tahun 2012-2014.

Saragai (2013) dengan judul " Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Minahasa Selatan". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah

Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah pendapatannya belum baik. Ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengolah anggaran belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) yang disusun dalam sebuah skripsi "Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten". Klaten Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Efektivitas. Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD. Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Kemandirian. Perkiraan Kinerja Keuangan melalui Analisis Trend untuk Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian pada DPPKA Kabupaten Klaten pada tahun 2006 sampai dengan 2010. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Sri menunujukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2006 sampai dengan 2010 cenderung tidak stabil. Tingkat kemandirian Kabupaten Klaten terhitung sangat rendah dan tingkat ketergantunngan daerah terhadap pemerintah pusat baik Provinsi maupun pusat masih tinggi. Namun berdasarkan Analisis Trend yaitu perkiraan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten diperkirakan cenderung baik dan naik dari tahun-tahun sebelumnya terutama mengenai Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio Kemandirian untuk tahun 2011 dan 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2007) dalam skripsinya yang berjudul "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time Series yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti : Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisen karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

Tabel 2.3

Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anis Karlina (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya Secaea Umum Dikatakan Kurang baik dalam varians pendapatan.
2.	Wahidah Niken Kusumadewi (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014	Kinerja Pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang baik dilihat dari kontribusi Pendapatan asli daerah (PAD) Terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relative kecil.

3.	Saragai (2013)	Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Minahasa Selatan.	Kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah pendapatannya belum baik. Ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target.
4.	Widada (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten.	Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2006 sampai dengan 2010 cenderung tidak stabil. Tingkat kemandirian Kabupaten Klaten terhitung sangat rendah dan tingkat ketergantunngan daerah terhadap pemerintah pusat baik Provinsi maupun pusat masih tinggi. Namun berdasarkan Analisis *Trend* yaitu perkiraan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten diperkirakan cenderung baik dan naik dari tahun-tahun sebelumnya terutama mengenai Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio Kemandirian untuk tahun 2011 dan 2012.
5.	Fitriyah (2007)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar),	Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD.

2.4 Kerangka Pemikiran

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka APBD.

Kinerja keuangan adalah pencapaian atas apa yang direncaanakan. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerja tersebut menjadi jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang digunakan antara lain seperti asio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2006: 152) menyatakan bahwa desain penelitian adalah merupakan rencana struktur peneliti yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membangun hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis data. Desain penelitian melibatkan serangkaian pilihan yang sangat tergantung seberapa hati-hati peneliti memilih berbagai alternative desain yang dapat memenuhi tujuan tertentu dari penelitian.

Menurut Sekaran (2006: 155) Desain penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Studi

   Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017.

2. Jenis Investigasi

   Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilikakuan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

3. Tingkat Invertensi Peneliti.

   Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi aktivitas normal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh.

4. Pengaturan Studi

   Dalam penelitian ini diperlukan data dari usaha yang sebenarnya yaitu studi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh.

5. Unit Analisis

   Unit analisis penelitian ini adalah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 yang berlokasi di Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 26, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415.

6. Horizon Waktu

   Horizon waktu dalam penelitian ini adalah one shoot, yaitu studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui dan tahap penelitian, yaitu:

1. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan langsung yang dijadikan objek penelitian untuk mendapat informasi atau data yang berguna untuk penulis dalam penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam perusahaan untuk memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan, kinerja keuangan daerah, serta unsur-unsur yang terkait dengan kinerja keuangan daerah. Sugiyono (2012:197) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Observasi

Melakukan Pengamatan Langsung terhadap objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data dari dokumen perusahaan berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi sangatberguna karena untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan di pakai sebagai bukti dalam penelitian. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, Foto, video tape, dokumen pribadi, catatan pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

3.3 Teknik Analisis Data

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Ulum (2012:31), rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, dengan rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100$$

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, dan sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Menurut Adhiantoko (2013), secara skematis rasio ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

3. Rasio Keserasian

Terdapat dua (2) perhitungan dalam rasio keserasian, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Raio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Secara skematis, rasio keserasian untuk belanja operasi dapat ditulis sebagai berikut (Mahmudi, 2013:164):

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

4. Rasio Pertumbuhan

Menurut Ulum (2012:33), rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Terdapat dua (2) jenis pertumbuhan keuangan daerah, yaitu pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100$$

Dengan Keterangannya:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pada tahun 1957 setelah Aceh kembali memperoleh status sebagai Provinsi yang terlepas dari Provinsi Sumatera Utara, langkah-langkah strategis pun kemudian dilakukan Pemerintah Daerah Aceh (ketika itu bernama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh). Fokus utama dilekatkan pada upaya membangun pendidikan, meletakan fondasi ekonomi, serta membenahi aspek kepemimpinan daerah.

Wujud konkrit dari pembangunan bidang pendidikan ini adalah peresmian Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam yang didirikan di atas idealisme untuk mengubah Aceh dalam kancah darulharb (wilayah perang dan pertikaian) menjadi darussalam (wilayah yang penuh kedamaian). Dasar dan idealisme ini sengaja disemai tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu untuk memungkinkan pembangunan daerah dilakukan dalam perspektif moderen dan progresif sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan terutama tantangan menghadapi masa depan

Idealisme yang tumbuh ketika Kopelma Darussalam dibangun nyata terlihat pada pola pembangunan yang kemudian dilakukan. Dilingkungan dalam kampus Darussalam ditempatkan secara berdampingan tiga lembaga pendidikan tinggi, yaitu Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), IAIN Jamiah Ar-Raniry, dan Dayah Pante Kulu, wujud bangunan kampus Darussalam yang mengintegrasikan ketiga jenis pendidikan diatas sesungguhnya juga menggambarkan pola kepemimpinan Aceh yang meliputi tiga unsur; ulama, umara, zuama.

Pembangunan Aceh melalui pembenahan pendidikan didasari pertimbangan substansial sebagaimana dikemukakan Gubernur Aceh kala itu, Ali Hasjmy, bahwa "Bila agama diurus oleh orang-orang yang tidak berpendidikan maka yang berkembang adalah khurafat. Begitu pula bila adat diurus oleh orang-orang yang bodoh maka yang berkembang adalah kejahilan." Tentu saja fondasi dasar demikian merupakan pilihan tepat memulai pembangunan, hali ini terbukti pada periode 1967-1978 ketika Darussalam yang dibangun dan dibina diatas prinsip damai mampu memberi perubahan signifikan. Berkat peran Kopelma Darussalam, masyarakat Aceh pasca kemelut yang cenderung tertutup, berubah lebih terbuka dalam banyak sisi; dalam bergaul maupun dalam bersikap dan berpikir.

Lingkungan pendidikan Kopelma Darussalam ini dalam sejarahnya nanti terlihat memberikan kontribusi signifikan dalam kajian-kajian pembangunan daerah dengan melahirkan lembaga perencanaan pembangunan daerah yang diberi nama Badan Pembangunan Daerah Aceh atau Aceh Development Board (ADB).

Dikemudian hari ADB berganti nama dan hinga kini dikenal dengan sebutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh.

Setelah Persoalan pendidikan ditangani secara komprehensif, permasalahan lain yang kemudian hadir pada awal Provinsi Daerah Istimewa Aceh terbentuk kembali pada tahun 1957 (pasca peleburan ke Porvinsi Sumatera Utara) Adalah persoalan dana yang terbatas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Untuk menangani keterbatasan dana pembangunan ini, pemerintah daerah yang saat itu dipimpin oleh Ali Hasjmy dan Letkol A.M Namploh antara lain memprakasai pendirian Bank Kesejahteraan Atjeh NV (kini dikenal dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah atau disingkat BPD).

Persoalan lain yang juga muncul masa ini dan bersifat tidak kalah penting adalah krisis kepemimpinan dan ketokohan sebagai akibat perang dan konflik yang berkepanjangan. Menyadari persoalan yang timbul di bidang kepemimpinan tersebut, Gubernur A. Muzakkir Walad yang menggantikan Ali Hasjmy menggagas terbentuknya sebuah lembaga yang diarahkan menjadi tempat resmi bagi berbagai kalangan kepemimpinan dan kotokohan untuk saling bertemu. Diharapkan dengan pertemuan tersebut dapat melahirkan berbagai pemikiran keahlian untuk membuat pembangunan Aceh berlangsung dengan akselarasi yang tinggi. Dan diharapkan juga -dengan lembaga ini menghasilkan konsep-konsep pembangunan yang tangguh, handal dan lebih didasari pada pertimbangan-pertimbangan rasional daripada pertimbangan irasional dan emosional.

Untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh lalu menggandeng para cendikiawan dari Universitas Syiah Kuala untuk bersama-sama dengan dinas/instansi daerah serta masyarakat membantu merumuskan konsep serta perencanaan pembangunan yang baik bagi Pemerintah Aceh. Maka pada tanggal 15 Oktober 1967 berdasarkan surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 089/1967 terbentuklah lembaga yang dimaksud dengan nama Badan Pertimbangan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

BP3D sebernarnya bukanlah badan baru untuk tujuan yang sama, karena Lima tahun sebelumnya tepatnya tanggal 30 Januari 1962 berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 22/1962 telah membentuk Badan Perancang Daerah (Bapeda) sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 19/1963 tanggal 17 Januari 1962 tentang Aceh Membangun. Bebarapa belun setelah itu Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) untuk Daerah Aceh berpedoman pada keputusan presiden Nomor 655 Tahun 1961 tanggal 22 Desember 1961 membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPD) untuk Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan BKPD ini ditetapkan dengan (Surat) Keputusan Nomor Kpts/pedarmilda-075/1962 tanggal 6 September 1962.

Pada tahun 1963 dengan terjadinya perubahan kondisi sosial politik dan keamanan Aceh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan keputusan Nomor

36 tanggal 23 Mei 1963 membatalkan Keputusan PDMD untuk Daerah Istimewa Aceh sebagaimana tersebut diatas dan dengan Keputusan yang sama membentuk BKPD yang selanjutnya disingkat dengan akronim BKPD Dista. Dua tahun setelah itu, dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 BKPD dilebur. Bersamaan dengan peleburan tersebut Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Keputusan Nomor 089/1967 tanggal 15 Oktober 1967 untuk membentuk badan baru bernama BP3D sebagaimana telah disebut dimuka. BP3D tidak berumur panjang karena setahun kemudian gubernur meleburnya menjadi badan baru bernama Badan Perencana Pembangunan Aceh (BPPA) atau sering juga disebut Aceh Development Board (ADB). Pembentukan ADB ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 53/II/1968 tanggal 26 Juni 1968.

Melalui surat keputusan Gubernur ini, Badan Perencanaan Pembangunan Aceh lahir dengan struktur organisasi, tatakerja, kedudukan, dan fungsi untuk menyikapi pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Badan ini tidak hanya sebagai badan pembantu gubernur dalam memberi pertimbangan menyusun perencanaan pembiayaan dan pembangunan daerah, bahkan menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenagan megkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan dalam Provinsi Daerah Instimewa Aceh. Profesor A. Majid Ibrahim yang saat itu menjabat Rektor Universitas Syiah Kuala ditunjuk menjadi pimpinan dengan jabatan Ketua Pimpinan Harian Badan Perencanaan Pembangunan Aceh.

Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Aceh, pemerintah daerah kemudian membebankan enam hal, yaitu :

1. Penyusunan Pola dasar pembangunan daerah yang didasarkan kepada sistem prioritas;
2. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan daerah;
3. Menyusun anggaran belanja tahunan untuk kepentingan pembangunan dan anggaran untuk masing-masing proyek yang akan dilaksanakan;
4. Melaksanakan berbagai survei untuk kepentingan perumusan program pembangunan yang lebih rasional atau realistis;
5. Melaksanakan berbagai studi kelayakan untuk proyek-proyek yang akan dibangun oleh perusahaan-perusahaan swasta;
6. Menjadi penasihat pemerintah daerah dalam soal ekonomi keuangan.

Berkat peran Badan Perencanaan Pembangunan Aceh yang secara nyata dan signifikan berhasil memacu pembangunan Daerah Istimewa Aceh melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah, maka pada perkembangannya Presiden Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan status menjadi salah satu komponen dalam lingkungan organisasi pemerintah daerah. Peningkatan status ini dilakukan melalui surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1973. Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1974 yang mempertegas pedoman pembentukan, penyusunan organisasi, tata kerja, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab Badan

Perencanaan Pembangunan Aceh. Sebagai pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1973 yo Keputusan Dalam Negeri Nomor 142/1974, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh lalu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 393/1975. Dengan surat keputusan ini gubernur secara resmi mengganti nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Seiring dengan peningkatan status, maka fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga bertambah tidak hanya terbatas pada tugas-tugas perencanaan daerah tetapi juga mengcakup tugas-tugas pengendalian operasional. Kecuali bertugas secara teknis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengoordinir dan mengintegrasikan usaha penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah serta melakukan pengendalian operasional kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Susunan struktur organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
    a) Sub. Bagian Umum
    b) Sub. Bagian Kepegawaian

c) Sub. Bagian Keuangan

3. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
   a) Sub. Bidang Pendanaan APBA
   b) Sub. Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan
   c) Sub. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
   a) Sub. Bidang Penelitian Ekonomi Prasaran Wilayah
   b) Sub. Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan
   c) Sub. Bidang Pengembangan Inovasi
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
   a) Sub. Bidang Pengendalian dan Pembangunan
   b) Sub. Bidang Penelitian Evaluasi Pembangunan
   c) Sub. Bidang Data dan Publikasi
6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia
   a) Sub. Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh
   b) Sub. Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
   c) Sub. Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perumahan
   a) Sub. Bidang Prasarana Wilayah
   b) Sub. Bidang Pengembangan Wilayah

c) Sub. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

8. Kepala Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

a) Sub. Bidang Ketahanan Pangan

b) Sub. Bidang Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata

c) Sub. Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi

Berikut ini bagan struktur organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA):

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Sumber: Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

4.1.3 Tugas Pokok Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Berikut ini tugas dan fungsi dari bagian-bagian Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA):

1. Kepala Badan

   Kepala Badan mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) serta membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK)

   Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan tekhnis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP)

   Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM)

   Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

   Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah.

7. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Penyediaan Data/informasi, koordinasi pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

8. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

   Bidang program dan pendanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, kerjasama pembangunan, menyusun dokumen perencanaan daerah dan rencana program lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Aceh serta pendanaan pembangunan daerah.

4.1.4 Visi dan Misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yaitu : "Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki".

Berdasarkan pada visi di atas, dan melihat kondisi Provinsi Aceh pasca konflik dan bencana tsunami dan gempa bumi dan dengan berpegang kepada tugas pokok dan fungsinya, maka Bappeda Provinsi Aceh menetapkan visi: "Menjadikan Bappeda Aceh sebagai pusat perencanaan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan"

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi Bappeda Aceh kedepan yaitu dengan:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi lebih berkualitas dan profesional;
2. Peningkatan pengelolaan dan analisis data yang valid dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan;
3. Peningkatan koordinasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan;
4. Sistem perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif;
5. Peningkatan peran pengendalian, *monitoring* dan evaluasi pembangunan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), maka laporan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
2015	Rp. 5.000.000	Rp. 18.072.158	361,4%
2016	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100%
2017	Rp. 5.000.000	Rp. 10.284.932	205,7%

Sumber: Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 2018

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 persentase realisasi pendapatan melebihi anggaran pendapatan yaitu sebesar 361,4%. Namun pada tahun 2016, realisasi pendapatan tidak melebihi maupun

kurang dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Pada tahun 2017 persentase realisasi pendapatan melebihi anggaran yaitu sebesar 205,7%.

4.2.2 Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), maka didapatilah laporan anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
2015	Rp. 64.683.675.064	Rp. 59.471.691.713	91,9%
2016	Rp. 55. 328.166.779	Rp. 50.330.501.648	90,7%
2017	Rp. 71.056.612.288	Rp. 59.573.136.087	83,8%

Sumber: Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 2018

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase realisasi belanja anggaran belanja yaitu sebesar 91,9%. Namun pada tahun 2016, persentase realisasi belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,7%. Pada tahun 2017 persentase realisasi belanja juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,8%.

4.3 Analisis Kinerja Keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan (Bastian, 2015).

Dalam hal ini penulis hanya melakukan penilaian laporan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan tanggungjawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan yang ada dibawahnya (Sistiana, 2014). Adapun Pola Kemampuan Daerah Dalam Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Pola Kemampuan Daerah Dalam Derajat Desentralisasi

No	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
1	00,00 - 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 - 20,00	Kurang
3	20,01 - 30,00	Cukup
4	30,01 - 40,00	Sedang
5	40,01 - 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber: Adhiantoko (2013)

Berdasarkan hasil pengamatan pada laporan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017, maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai berikut:

a) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2015

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{5.000.000}{18.072.158} \text{ X } 100 = 27{,}67\%$$

b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{5.000.000}{5.000.000} \text{ X } 100 = 100\%$$

c) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{10.284.932}{10.284.932} \text{ X } 100 = 100\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tahun Anggaran 2015-2017

No.	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Nilai Rasio
1	2015	Rp. 5.000.000	Rp. 18.072.158	27,67%
2	2016	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100%
3	2017	Rp. 10.284.932	Rp. 10.284.932	100%
Rata-rata		**Rp. 6.761.644**	**Rp. 11.119.030**	**75,89%**

Sumber: Data diolah, 2018

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dimaksudkan untuk mengetahui derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Dari hasil perhitungan di atas, maka rata-rata rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun anggaran 2015-2017 sebesar 75,89%. Pada Tahun Anggaran 2015 rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebesar 27,67%, yaitu berada dikategori Cukup. Hal ini berarti bahwa PAD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki kemampuan yang cukup dalam membiayai pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebesar 100%, yaitu berada dikategori Sangat Baik. Hal ini berarti bahwa PAD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membiayai pembangunan daerah.

2. Rasio Keserasian

Terdapat dua perhitungan dalam rasio keserasian, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Sedangkan Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (Halim, 2012:236).

Berdasarkan hasil pengamatan pada laporan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017, maka Rasio Keserasian sebagai berikut:

1. Rasio Keserasian Belanja Operasi

   a) Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{56.015.585.613}{59.471.691.713} \text{ X } 100 = 94{,}19\%$$

   b) Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{48.026.543.648}{50.330.501.648} \text{ X } 100 = 95{,}42\%$$

   c) Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{55.685.503.087}{59.573.136.087} \text{ X } 100 = 93{,}47\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rasio keserasian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rasio Keserasian Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2015-2017

No.	Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Nilai Rasio
1	2015	Rp. 56.015.585.613	Rp. 59.471.691.713	94,19%
2	2016	Rp. 48.026.543.648	Rp. 50.330.501.648	95,42%
3	2017	Rp. 55.685.503.087	Rp. 59.573.136.087	93,47%
Rata-rata		**Rp. 53.242.544.116**	**Rp. 56.458.443.149**	**94,36%**

Sumber: Data diolah, 2018

Rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun anggaran 2015-2017 sebesar 94,36% dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio keserasian belanja operasi yaitu sebesar 94,19%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan nilai rasio jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 95,42%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan nilai rasio jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 93,47%. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) belum stabil dalam mengalokasikan belanja daerah untuk belanja operasi.

Adapun rasio keserasian belanja modal sebagai berikut:

a) Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun Anggaran 2015

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{3.456.106.100}{59.471.691.713} \text{ X } 100 = 5{,}81\%$$

b) Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{2.303.958.000}{59.573.136.087} \text{ X } 100 = 4{,}58\%$$

c) Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100 = \frac{3.887.633.000}{59.573.136.087} \text{ X } 100 = 6{,}52\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rasio keserasian belanja modal sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rasio Keserasian Belanja Modal

Tahun Anggaran 2015-2017

No.	Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Nilai Rasio
1	2015	Rp. 3.456.106.100	Rp. 59.471.691.713	5,81%
2	2016	Rp. 2.303.958.000	Rp. 59.573.136.087	4,58%
3	2017	Rp. 3.887.633.000	Rp. 59.573.136.087	6,52%
Rata-rata		**Rp. 3.215.899.033**	**Rp. 59.539.321.296**	**5,64%**

Sumber: Data diolah, 2018

Rata-rata rasio keserasian belanja modal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun anggaran 2015-2017 sebesar 5,64% dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio keserasian belanja modal yaitu sebesar 5,81%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan nilai rasio jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 4,58%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan nilai rasio jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 6,25%. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) belum stabil dalam mengalokasikan belanja daerah untuk investasi.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya (Ulum, 2012:33). Terdapat dua jenis pertumbuhan keuangan daerah, yaitu pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan hasil pengamatan pada laporan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015-2017, maka Rasio Pertumbuhan sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan PAD

   a) Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2015 = -

   b) Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2016-Realisasi PAD Tahun 2015}}{\text{Realisasi PAD Tahun 2015}} \text{ X } 100$$

$$= \frac{5.000.000-5.000.000}{5.000.000} \text{ X } 100 = 0\%$$

   c) Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2017-Realisasi PAD Tahun 2016}}{\text{Realisasi PAD Tahun 2016}} \text{ X } 100$$

$$= \frac{10.284.932-5.000.000}{5.000.000} \text{ X } 100 = 105,7\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rasio Pertumbuhan PAD
Tahun Anggaran 2015-2017

No.	Tahun	Realisasi PAD X_n	Realisasi PAD X_{n-1}	Nilai Rasio
1	2015	-	-	-
2	2016	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	0%
3	2017	Rp. 10.284.932	Rp. 5.000.000	105,7%

Rata-rata	**Rp. 7.642.466**	**Rp. 5.000.000**	**53%**

Sumber: Data diolah, 2018

Analisis Rasio Pertumbuhan PAD dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan PAD pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun anggaran 2015-2017 sebesar 53%. Pada tahun 2016 diperoleh nilai rasio pertumbuhan PAD yaitu sebesar 0%. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan nilai rasio yaitu sebesar 105,7%. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan PAD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Adapun rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

a) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun Anggaran 2015 = -

b) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun 2016-Realisasi PendapatanTahun 2015}}{\text{Realisasi PendapatanTahun 2015}} \text{ X } 100$$

$$= \frac{5.000.000\text{-}18.072.158}{18.072.158} \text{ X } 100 = -72{,}33\%$$

c) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{Realisasi PendapatanTahun 2016-Realisasi PendapatanTahun 2015}}{\text{Realisasi Pendapatan Tahun 2015}} \text{ X } 100$$

$$= \frac{10.284.932\text{-}5.000.000}{5.000.000} \text{ X } 100 = 105{,}7\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2017

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan X_n	Realisasi Pendapatan X_{n-1}	Nilai Rasio
1	2015	-	-	-
2	2016	Rp. 5.000.000	Rp. 18.072.158	-72,33%
3	2017	Rp. 10.284.932	Rp. 5.000.000	105,7%
Rata-rata		**Rp. 7.642.466**	**Rp. 11.536.079**	**16,69%**

Sumber: Data diolah, 2018

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun anggaran 2015-2017 sebesar 16,69%. Pada tahun 2016 diperoleh nilai rasio pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar -72,33%. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan nilai rasio yaitu sebesar 105,7%. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan PAD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan negatif.

4.4 Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan realisasi pendapatan dan belanja Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun anggaran 2015-2017, maka kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2015-2017 mengalami peningkatan, yaitu tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015, sedangkan pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Rasio desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, dan sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD (Sistiana dkk, 2014). Dengan meningkatnya nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), itu menandakan bahwa kemampuan PAD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan Pendapatan Daerah sudah baik. Hal ini menjadi tugas penting bagi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mempertahankan peningkatan PAD.

Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) jika dilihat dari Rasio Keserasian Tahun Anggaran 2015-2017 mengalami fluktuasi. Rasio keserasian merupakan rasio untuk mengukur kesesuaian kinerja keuangan daerah. Rasio ini timbul dikarenakan dalam pengelolaan belanja daerah, terdapat dua kelompok belanja, yaitu belanja operasional atau belanja rutin dengan belanja modal atau belanja pembangunan. Oleh karena itu, keserasian yang

dimaksudkan adalah keseimbangan antara kedua kelompok belanja tersebut Halim (2012:236). Dengan berfluktuasinya nilai Rasio Keserasian Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), itu mengindikasikan bahwa keseimbangan belanja operasional dan belanja modal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) belum stabil dalam pengalokasian belanja daerah untuk investasi maupun belanja operasi. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) perlu melakukan evaluasi atas ketidakstabilan nilai rasio ini.

Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2015-2017 mengalami pertumbuhan PAD dengan nilai rasio 105,7%. Jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan, mengalami peningkatan hingga 105,7% pada Tahun Anggaran 2017 dari Tahun Anggaran 2016. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau nilai belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2013:138). Hal ini menjadi tugas penting bagi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mempertahankan pertumbuhan PAD maupun pendapatan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 27,67% berada di kategori Cukup, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 100% berada di kategori Sangat Baik, pada Tahun Anggaran 100% berada di kategori Sangat Baik.
2. Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 94,19%, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 95,42%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 93,47%. Jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Modal pada Tahun Anggaran sebesar 5,81%, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 4,58%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 6,52%.
3. Kinerja keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 0%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 105,7%. jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Tahun

Anggaran 2016 sebesar -72,33%, pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 105,7%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh agar mempertahankan nilai Rasio Desentralisasi Fiskal, di mana berada di kategori sangat baik.
2. Diharapkan kepada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh agar mempertahankan nilai Rasio Keserasian, di mana nilai rasio ini tinggi yang berarti bahwa pengalokasian belanja daerah untuk operasional maupun investasi cukup baik.
3. Diharapkan kepada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh agar mempertahankan Rasio Pertumbuhan, di mana nilai Rasio Pertumbuhan tumbuh melebihi 100%.
4. Penelitian selanjutnya, diharapkan memilih periode waktu yang lebih panjang untuk memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi juga diharapkan dapat menambah beberapa rasio kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiantoko, Hony (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi Tidak Diplublikasikan.* Yogyakarta: Universitas Negeri

Agustina, Oesi (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.*Jurnal Benhmark Volume 2 November 2013.*

Adisasmita, Rahardjo (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Graha Ilmu

Ahmad, Badu (2013). *Manajemen Pelayanan Publik.* Jakarta: Andi Offset

Halim, Abdul (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah(Edisi Ketiga).* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Karlina Anis, (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntasni,* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indomesia (STIESIA) Vol. 6 No. 3, Maret 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui http://kbbi.web.id/. Diakses: Tanggal 12 Juli 2018

Mahmudi. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Aderah Edisi Dua.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohammad (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.

Nordiawan, Deddi, dkk. (2007).*"Akuntansi Pemerintahan".* Jakarta. Salemba Empat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara

Pramita, Puput Risky (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi Vol.3, No. 7(2013)*

Sistiana, Mega, Supranoto, dan M.Hadi Makmur (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa TimurTahun 2006-2010. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, I(1): 1-10*

Ulum, Ihyaul, M.D (2012). *Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar).* Jakarta: Bumi Aksara

Saragai, Mega, Supranoto, dan M. Hadi Makmur (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 1(1) : 1-10.*

Widada, sri (2012) "Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten". *Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 03 Desember 2012.

Kusumadewi, Niken, Wahidah, (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4 (10), 2016.

Saragay, (2013) " Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Ilmiah Akuntans*i, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3, Edisi 03 September 2018

Agustin, Fitriyah (2007),"*Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar"* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang